

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) dalam Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok

Dewi Anggraeni ^{1*}, Dwi Purwoko ^{2*}

^{1,2} Program Pascasarjana, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ dewiangraeniilma@gmail.com, ² d_purwoko2003@yahoo.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Keywords

Implementasi;
Kebijakan;
Sistem Informasi Terpadu

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini untuk menganalisa dan mengevaluasi bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) Dalam Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok serta hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan studi pustaka dengan 6 orang informan. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) Dalam Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok terlaksana sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hambatan-hambatan yang ditemukan adalah kurangnya kemampuan para kader dalam menggunakan aplikasi, kurangnya pelatihan terkait kegiatan yang dikerjakan, dan rendahnya sarana dan prasarana. Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini adalah dengan melakukan pelatihan kepada para kader, melakukan sosialisasi kepada warga, dan meningkatkan sarana dan prasarana.

This is an open access article under the [BY-NC-SA](#) license.

PENDAHULUAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terutama di Kelurahan Curug, diperlukan suatu sistem informasi dan database kesehatan yang terintegrasi. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu elemen penting dalam sistem pelayanan kesehatan di tingkat masyarakat terdekat. Posyandu merupakan salah satu pilar penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan kesehatan preventif dan promotif. Posyandu bukan hanya sekedar pusat pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi ruang interaksi sosial yang memperkuat ikatan antarwarga. Melalui posyandu, berbagai program kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, serta penyuluhan kesehatan dapat dilaksanakan secara terencana dan terstruktur dengan baik.

Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Udoji (1981,32) dengan tegas mengatakan bahwa *the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented* (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan atau disetujui. Implementasi Kebijakan merupakan langkah lanjutan berdasarkan suatu kebijakan formulasi. Definisi yang umum dipakai menyangkut kebijakan implementasi adalah: (Wahab, 1997:63) "Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan." Dunn (1981:56) menyatakan bahwa akan halnya implementasi kebijakan, lebih bersifat



kegiatan praktis, termasuk didalamnya mengeksekusi dan mengarahkan.

Lebih lanjut dikemukakan sebagai berikut: *“Policy implementation involves the execution and steering of a laws of action overtime. Policy implementation is essentially a practical activity, as distinguished from policy formulation, which is essentially theoretical.”* Sehubungan dengan sifat praktis yang ada dalam proses implementasi kebijakan di atas, maka hal yang wajar bahwa implementasi ini berkaitan dengan proses politik dan administrasi. Hal tersebut disebabkan karena ia menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (*policy goals*). Dan jika dilihat dari konteks implementasi kebijakan, maka hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (*power*), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta ijin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan.

Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) adalah sebuah unit yang aktif dalam menyediakan layanan kesehatan kepada masyarakat dengan mudah diakses dan biaya terjangkau. Salah satu layanan yang disediakan adalah penimbangan dan pengukuran berat, tinggi, serta suhu badan anak setiap bulan. Posyandu merupakan kegiatan kesehatan dasar yang dilaksanakan oleh masyarakat, untuk masyarakat, dan dengan dukungan petugas kesehatan di suatu wilayah kerja puskesmas.

Sistem Informasi Posyandu masih jauh dari standar yang ditetapkan oleh Pemerintah. Beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu seperti proses pengelolaan data menjadi informasi yang belum efektif dan efisien dalam mekanisme yang terintegrasi dan terkoordinasi, terdapat tumpang tindih dalam pengumpulan dan pengolahan data kesehatan, dan masih ada pengumpulan data yang berulang-ulang oleh unit yang berbeda sehingga ada risiko data dan kegiatan yang tercatat lebih dari satu kali.

Sistem Informasi Posyandu memiliki tujuh format yang terdiri dari (1) catatan ibu hamil, kelahiran, kematian bayi dan kematian ibu, (2) register bayi di wilayah kerja Posyandu (3) register balita di wilayah kerja Posyandu (4) register ibu hamil di wilayah kerja Posyandu. Selain keempat format tersebut, masih ada tiga format pendukung lainnya yang terdiri dari (5) register WUS/PUS di wilayah kerja Posyandu, (6) register ibu hamil di wilayah kerja Posyandu, (7) Data data pengunjung Posyandu, kelahiran dan kematian bayi dan ibu hamil, persalinan atau melahirkan. Ketujuh format tersebut harus diisi secara teratur oleh kader Posyandu sesuai dengan Sistem Informasi Posyandu. Buku pedoman tersebut dipegang oleh bidan, kemudian bidan akan menyampaikan mekanisme pencatatan kepada kader Posyandu.

Untuk meningkatkan dan memaksimalkan *output* atau hasil kerja salah satunya adalah dengan menerapkan implementasi kebijakan SITEPU. Dengan di terapkannya kebijakan ini maka akan mempermudah sistem pelaporan bulanan di posyandu. Dalam hal penelitian ini diidentifikasi di Kelurahan Kecamatan Bojongsari Kota Depok terdapat data bahwasannya belum tertatanya laporan dari pelaporan bulanan posyandu. Harapannya dengan diterapkannya SITEPU adalah hasil hasil pelaporan sesuai dengan apa yang sudah berjalan dengan aturan yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif ini sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah yaitu objek yang apa adanya, tidak di manipulasi oleh peneliti memasuki objek setelah keluar dari objek dan setelah keluar dari objek relatif tidak berubah.

Ada berbagai jenis penelitian yang dapat digunakan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitiannya. Salah satu jenis penelitian ialah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Sedangkan pengertian deskripsi analisis adalah penelitian di mulai dengan penjelasan terlebih dahulu atas definisi-definisi suatu istilah, kemudian dilanjutkan dengan menguraikan masalah-masalah yang timbul atas suatu fenomena, terakhir melakukan analisis atas upaya-upaya yang dilakuaknn oleh pihak bersangkutan dalam mengatasi masalah tersebut.

Fokus penelitian adalah uraian detail penulis terhadap konsep yang akan di teliti yang berisikan ukuran atau parameter dari konsep yang menjadi dasar dalam pedoman wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi yang digunakan. Penelitian ini menfokuskan pada Implementasi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) Dalam Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di Kecamatan Bojongsari Kota Depok, melalui wawancara terhadap beberapa informan dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

1. Implementasi Kebijakan

a) Tingkat Kepatuhan Pada Peraturan yang berlaku

Dalam perspektif pertama ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan. Dari hasil wawancara, informan memberikan penilaian. Dengan Informan 1 Ibu Irmayani selaku kader posyandu sejahtera menyatakan bahwa:

“Terkait laporan bulanan posyandu alur atau prosedurnya sudah sesuai SOP”.

Kemudian Informan 2, Ibu Dwi Tyas selaku kader posyandu sentosa telah mengutarakan:

“Untuk mendapatkan informasi terkait prosedur/alur implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Anda perlu menghubungi pihak terkait di kelurahan tersebut. Biasanya, informasi tersebut dapat diperoleh melalui Dinas Kesehatan setempat atau puskesmas yang terlibat dalam implementasi tersebut.”

Lalu Informan 3, Ibu Sumiati selaku kader posyandu bahagia menyampaikan bahwa:

“Prosedur implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok melibatkan langkah-langkah berikut:

Penetapan Tim Implementasi: Identifikasi tim yang bertanggung jawab untuk menjalankan implementasi, termasuk kader Posyandu, petugas Puskesmas, dan pihak terkait.

Pelatihan: Lakukan pelatihan kepada kader Posyandu dan petugas Puskesmas terkait penggunaan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) agar mereka dapat mengelola laporan bulanan dengan efektif.

Pengujian Sistem: Lakukan uji coba kecil untuk memastikan bahwa Sitepu dapat berintegrasi dengan baik dalam proses pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug.

Implementasi Tahap Awal: Terapkan Sitepu dalam satu atau beberapa Posyandu di Kelurahan Curug untuk memantau kinerja sistem dan mengidentifikasi potensi kendala.

Evaluasi dan Penyesuaian: Lakukan evaluasi terhadap implementasi tahap awal, identifikasi kendala yang muncul, dan lakukan penyesuaian pada SOP apabila diperlukan.

Kendala yang mungkin muncul melibatkan resistensi dari kader Posyandu atau petugas Puskesmas terhadap perubahan, kurangnya pemahaman terhadap teknologi, atau masalah teknis dalam penggunaan Sitepu. Diperlukan komunikasi yang efektif dan pendekatan yang inklusif untuk mengatasi kendala tersebut.”

Sementara Informan 4, Ibu Rina Meijes selaku ketua posyandu Greenland menyampaikan dengan singkat bahwa:

“Prosedur implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok melibatkan beberapa tahap. Implementator, kader, dan puskesmas seharusnya sudah sesuai dengan SOP. Namun, jika terdapat kendala, perlu dilakukan evaluasi mendalam

terhadap pemahaman, dukungan teknologi, dan pelatihan untuk memastikan kesesuaian dan peningkatan efektivitas implementasi.”

Selanjutnya informan 5 Ibu Siti Rohmi selaku kader posyandu Sehat memberikan jawaban sebagai:

“Prosedur implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok melibatkan beberapa tahapan. Pertama, pihak puskesmas perlu memastikan bahwa implementator dan kader telah diberikan pelatihan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Selanjutnya, mereka harus mengikuti langkah-langkah sesuai SOP untuk pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data bulanan Posyandu.”

Dan yang terakhir Ibu Mulyanah selaku kader posyandu Indah menyatakan bahwa: *“Iya sdh sesuai SOP, Prosedur implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat melibatkan langkah-langkah seperti:*

Analisis Kebutuhan: Identifikasi kebutuhan laporan bulanan Posyandu dan tentukan informasi yang perlu diintegrasikan dalam Sistem Informasi Terpadu.

Pemilihan Sistem: Pilih sistem Sitepu yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Kelurahan Curug.

Pelatihan Pengguna: Lakukan pelatihan kepada pengguna di Posyandu dan petugas di Kelurahan Curug untuk memastikan pemahaman yang baik terhadap sistem.

Integrasi Data: Implementasikan integrasi data laporan bulanan Posyandu ke dalam sistem Sitepu.

Uji Coba: Lakukan uji coba sistem untuk memastikan keberfungsian dan identifikasi potensi perbaikan.

Implementasi: Terapkan Sistem Informasi Terpadu secara penuh dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug. Monitoring dan Evaluasi: Pantau kinerja sistem secara berkala, lakukan evaluasi, dan sesuaikan kebijakan jika diperlukan.

Pastikan langkah-langkah ini disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik Kelurahan Curug.”

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bawahannya pelaksanaan Sistem Informasi Terpadu sudah sesuai dengan SOP yang ada, yaitu mengacu pada BKPSDM agar para peserta Diklat membuat inovasi guna memudahkan kegiatan di wilayah masing-masing. Sehingga keijakan SITEPU ini telah disetujui oleh pihak seperti Lurah, Camat, dan Diskominfo serta Stakeholder lainnya di wilayah Kota Depok.

b) Lancarnya Pelaksanaan Rutinitas dan Fungsi

Dalam perspektif pertama ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan. Dari hasil wawancara, informan memberikan penilain. Dengan Informan 1 Ibu Irmayani selaku kader posyandu sejahtera menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai karena dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan kami dalam pelaporan dan kegiatan posyandu dengan lancar.”

Kemudian Informan 2, Ibu Dwi Tyas selaku kader posyandu sentosa telah mengutarakan:

“Penyebabnya dapat berasal dari berbagai faktor seperti kurangnya pelatihan, kendala teknis, atau koordinasi yang tidak optimal. Sejauh mana kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar dapat diukur melalui pengumpulan data, umpan balik dari pengguna, dan evaluasi rutin.”

Lalu Informan 3, Ibu Sumiati selaku kader posyandu bahagia menyampaikan bahwa:

“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan, mempermudah pemantauan kesehatan masyarakat, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat di tingkat kelurahan.”

Sementara Informan 4, Ibu Rina Meijes selaku ketua posyandu Greenland menyampaikan dengan singkat bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai karena dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan, memprlancar kami dalam pelaporan dan kegiatan posyandu dengan dengan cepat dan efisien.”

Selanjutnya informan 5 Ibu Siti Rohmi selaku kader posyandu Sehat memberikan jawaban sebagai:

“Memadai bagi implementator dan kader, kesulitan teknis dalam menggunakan sistem, atau kurangnya koordinasi antara pihak terkait seperti puskesmas dan kelurahan. Penting untuk secara rutin melakukan evaluasi terhadap implementasi, mengidentifikasi kendala, dan memberikan perbaikan sesuai kebutuhan agar sistem dapat berjalan efektif.”

Dan yang terakhir Ibu Mulyanah selaku kader posyandu Indah menyatakan bahwa:

“Menurut saya sudah sesuai karena dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan dalam penginputan pelaporan dan kegiatan posyandu dengan dengan cepat dan efisien serta dapat menghematawaktu.”

Dari hasil wawancara ini dapat ditarik kesimpulan bahwasannya fungsinya yakni membuat laporan dan pemantauan kesehatan masyarakat dan dengan adanya sistem ini lebih mempermudah dalam membuat laporan tersebut.

c) Terwujudnya Kinerja dan Dampak yang di Kehendaki

Dalam perspektif pertama ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan. Dari hasil wawancara, informan memberikan penilain. Dengan Informan 1 Ibu Irmayani selaku kader posyandu sejahtera menyatakan bahwa:

“Kami dengan mudah membuat laporan bulanan posyandu sehingga tidak terlambat lagi.”

Kemudian Informan 2, Ibu Dwi Tyas selaku kader posyandu sentosa telah mengutarakan:

“Meningkatkan efisiensi pengumpulan, analisis, dan pelaporan data kesehatan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok. Dampak positif lainnya melibatkan peningkatan akurasi data, pemantauan kesehatan masyarakat yang lebih baik, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam upaya perbaikan kesehatan ditingkat Kelurahan.”

Lalu Informan 3, Ibu Sumiati selaku kader posyandu bahagia menyampaikan bahwa:

“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pelaporan. Hal ini dapat memudahkan monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam upaya perbaikan dan pengembangan Posyandu di wilayah tersebut.”

Sementara Informan 4, Ibu Rina Meijes selaku ketua posyandu Greenland menyampaikan dengan singkat bahwa:

“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat membawa dampak positif berupa peningkatan efisiensi dalam pelaporan, akurasi data, dan memudahkan pemantauan kinerja Posyandu secara real-time. Selain itu, Sitepu dapat meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait kesehatan masyarakat di wilayah

tersebut.”

Selanjutnya informan 5, Ibu Siti Rohmi selaku kader *posyandu Sehat* memberikan jawaban sebagai: *“Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat meningkatkan efisiensi pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data kesehatan. Hal ini dapat mempercepat akses informasi, meminimalkan kesalahan manusia, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.”*

Dan yang terakhir Ibu Mulyanah selaku kader *posyandu Indah* menyatakan bahwa:

“Dampak positif dari implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dapat mencakup peningkatan efisiensi, akurasi data, dan keterbukaan informasi, yang pada gilirannya dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen Posyandu.”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dampak dari ditetapkannya Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) adalah tersusunnya secara rapi dan mempermudah para kader dalam membuat laporan bulanan. Selain itu mempermudah *posyandu* dalam memantau kesehatan masyarakat.

2. Hambatan Dalam Implementasi

Dalam perspektif pertama ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan. Dari hasil wawancara, informan memberikan penilaian. Dengan Informan 1 Ibu Irmayani selaku kader *posyandu sejahtera* menyatakan bahwa: *“Ada beberapa kendala antara lain handphone kurang support terhadap aplikasi SITEPU, kader banyak mengisi data di aplikasi kesehatan lainnya.”*

Kemudian Informan 2, Ibu Dwi Tyas selaku kader *posyandu sentosa* telah mengutarakan : *“Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) di Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Anda perlu berkomunikasi langsung dengan pihak terkait, seperti kader Posyandu, petugas kesehatan, atau pihak yang bertanggung jawab atas implementasi tersebut. Kendala mungkin melibatkan aspek pelatihan, teknis sistem informasi, koordinasi antarinstansi, atau faktor lainnya. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui wawancara dengan stakeholders yang terlibat dalam implementasi tersebut.”*

Lalu Informan 3, Ibu Sumiati selaku kader *posyandu bahagia* menyampaikan bahwa: *“Kendala-kendala yang mungkin terjadi pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dapat meliputi:*

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi di lokasi.
2. Kekurangan pelatihan bagi pengguna sistem di tingkat operasional.
3. Resistensi atau ketidakpahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi tersebut.
4. Masalah keamanan data dan privasi yang mungkin timbul.
5. Tidak terjalannya koordinasi yang efektif antara pemangku kepentingan terkait.
6. Perlu analisis lebih lanjut untuk memahami konteks dan mengidentifikasi solusi yang sesuai.”

Sementara Informan 4, Ibu Rina Meijes selaku ketua *posyandu Greenland* menyampaikan dengan singkat bahwa: *“Beberapa kendala yang mungkin terjadi pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, dapat mencakup masalah teknis, kurangnya pelatihan bagi pengguna, hambatan dalam adaptasi teknologi, dan mungkin juga kendala dalam koordinasi antarinstansi terkait.”*

Selanjutnya informan 5 Ibu Siti Rohmi selaku kader *posyandu Sehat* memberikan jawaban

sebagai: *“Kendala umum dalam implementasi sistem informasi terpadu bisa melibatkan faktor teknis, sumber daya manusia, atau dukungan pihak terkait. Perlu dilakukan analisis lokal untuk memahami kendala yang mungkin muncul dalam konteks tersebut.”*

Dan yang terakhir Ibu Mulyanah selaku kader posyandu Indah menyatakan bahwa: *“Beberapa kendala yang mungkin terjadi pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok bisa melibatkan kurangnya pelatihan bagi petugas Posyandu, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, serta resistensi dari pihak terkait terhadap perubahan teknologi.”*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan ini adalah kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya kompetensi atau pemahaman para kader dalam menggunakan aplikasi, serta kurangnya koordinasi pada bidang terkait.

3. Upaya Mengatasi Hambatan

Dalam perspektif pertama ini peneliti telah mewawancarai beberapa informan. Dari hasil wawancara, informan memberikan penilaian. Dengan Informan 1 Ibu Irmayani selaku kader posyandu sejahtera menyatakan bahwa: *“Solusinya antara lain mengisi data bersama sama kader lainnya sehingga data anak posyandu terinput semua kedalam sistem.”*

Kemudian Informan 2, Ibu Dwi Tyas selaku kader posyandu sentosa telah mengutarakan bahwa: *“Solusi terhadap kendala-kendala pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU) di Pengelolaan Laporan Bulanan Posyandu di Kelurahan Curug dapat melibatkan langkah-langkah berikut:*

1. Pelatihan Intensif: Menyelenggarakan pelatihan yang lebih intensif bagi kader Posyandu dan petugas kesehatan terkait agar mereka dapat lebih memahami dan menguasai penggunaan sistem informasi dengan baik.
2. Dukungan Teknis: Menyediakan dukungan teknis secara reguler untuk menangani permasalahan teknis yang mungkin timbul selama implementasi. Hal ini dapat melibatkan tim IT atau teknisi yang dapat membantu pemecahan masalah dengan cepat.
3. Meningkatkan Koordinasi: Memperkuat koordinasi antara pihak terkait, seperti kelurahan, puskesmas, dan dinas kesehatan, untuk memastikan informasi dan tanggung jawab terkait implementasi dapat berjalan lancar.
4. Umpan Balik dan Evaluasi Berkala: Melakukan evaluasi secara berkala dengan mengumpulkan umpan balik dari para pengguna sistem. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah secara dini dan meningkatkan sistem berdasarkan pengalaman praktis.
5. Penyusunan Pedoman Operasional: Menyusun pedoman operasional yang jelas dan mudah dipahami bagi semua pihak yang terlibat, sehingga implementasi dapat berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
6. Peningkatan Kesadaran: Mengadakan kampanye atau sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat dan pentingnya penggunaan sistem informasi terpadu di Posyandu.

Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan dapat meminimalkan kendala-kendala yang mungkin muncul dan meningkatkan efektivitas implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu di tingkat kelurahan tersebut.”

Lalu Informan 3, Ibu Sumiati selaku kader posyandu bahagia menyampaikan bahwa: *“Untuk mengatasi kendala pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, beberapa langkah dapat diambil. Ini melibatkan evaluasi, pelatihan staf, dan koordinasi antar pihak terkait. Dengan pendekatan ini, dapat diharapkan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan.”*

Sementara Informan 4, Ibu Rina Meijes selaku ketua posyandu Greenland menyampaikan dengan singkat bahwa:

“Solusi untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dapat melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Pelatihan dan Penyuluhan: Memberikan pelatihan intensif kepada petugas Posyandu terkait penggunaan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) untuk memastikan pemahaman yang baik dan penggunaan yang efektif.
2. Pemantauan dan Evaluasi Rutin: Menerapkan sistem pemantauan dan evaluasi rutin untuk mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan harapan.
3. Dukungan Teknis: Menyediakan dukungan teknis yang memadai bagi pengguna, termasuk aksesibilitas tim teknis yang siap membantu penyelesaian masalah teknis yang mungkin timbul.
4. Kolaborasi dan Konsultasi: Melibatkan pihak terkait, termasuk kelurahan, kecamatan, dan pihak terkait lainnya, dalam proses perencanaan dan implementasi untuk mendapatkan masukan dan dukungan yang lebih luas.
5. Penyederhanaan Proses: Jika diperlukan, melakukan evaluasi ulang terhadap proses-proses yang terlibat dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu untuk memastikan keefektifan dan efisiensi implementasi.
6. Perbaikan Berkelanjutan: Membangun mekanisme perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dari pengguna dan pemantauan kinerja sistem.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang muncul dan meningkatkan efektivitas Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug.”

Selanjutnya informan 5 Ibu Siti Rohmi selaku kader posyandu Sehat memberikan jawaban sebagai:

“Solusi untuk kendala-kendala pada implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dapat melibatkan pelatihan bagi petugas, peningkatan infrastruktur teknologi, dan pendekatan kolaboratif antara pihak terkait. Terdapat juga perlunya evaluasi berkala untuk mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan dalam proses implementasi tersebut.”

Dan yang terakhir Ibu Mulyanah selaku kader posyandu Indah menyatakan bahwa:

“Solusi untuk kendala implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (Sitepu) dalam pengelolaan laporan bulanan Posyandu di Kelurahan Curug Kecamatan Bojongsari Kota Depok dapat melibatkan pelatihan lebih lanjut bagi pengguna, peningkatan infrastruktur IT, serta penguatan koordinasi antarstakeholder untuk memastikan integrasi yang lebih baik.”

Dari hasil wawancara di atas solusi dari kendala ini adalah dengan pelatihan agar dapat memaksimalkan kemampuan para kader dalam bekerja, selain itu adalah memberikan fasilitas kerja serta pengawasan dan evaluasi terhadap hasil kerja.

PEMBAHASAN

Namun, seringkali dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pelaporan data di posyandu. Beberapa tantangan tersebut yaitu sebagai berikut: 1). Pengelolaan Data Manual: Banyak posyandu yang masih mengelola data secara manual menggunakan catatan tulisan tangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dan keterlambatan dalam pengumpulan serta pelaporan data. 2). Tidak Terintegrasinya Data: Data kesehatan di posyandu seringkali tidak terintegrasi dengan sistem kesehatan di tingkat yang lebih tinggi, seperti puskesmas atau dinas kesehatan. Ini dapat menghambat koordinasi dan perencanaan program kesehatan secara efektif. 3). Keterbatasan Akses Informasi: Keterbatasan akses informasi yang akurat dan up-to-date mengenai kondisi kesehatan masyarakat di kelurahan dapat menghambat pengambilan keputusan yang tepat dalam hal penanganan

masalah kesehatan yang muncul.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan sebuah layanan sistem informasi dan database kesehatan posyandu yang terintegrasi. Sistem ini akan memiliki beberapa manfaat, antara lain: 1). Pengelolaan Data yang Efisien: Dengan adanya sistem informasi, pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan data dapat dilakukan secara lebih efisien dan akurat. 2). Integrasi Data: Data kesehatan di posyandu dapat diintegrasikan dengan sistem kesehatan yang lebih besar, memungkinkan koordinasi antara tingkatan layanan kesehatan dan pemantauan secara menyeluruh. 3). Pantauan Kesehatan Masyarakat: Data yang terkumpul secara digital dapat digunakan untuk memantau kondisi kesehatan masyarakat secara real-time, sehingga tindakan pencegahan atau intervensi dapat dilakukan lebih cepat. 4). Pengambilan Keputusan Berbasis Data: Informasi yang akurat dan terbaru dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan program kesehatan di kelurahan. 5). Pelaporan yang Mudah: Sistem ini dapat memudahkan dalam pembuatan laporan rutin maupun laporan khusus terkait kondisi kesehatan di posyandu. 7). Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Data yang mudah diakses dan dipahami dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan program-program yang ada di posyandu.

1. Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Terpadu (SITEPU)

Dalam hal ini pelaksanaan dari implementasi Sistem Informasi terpadu sudah sesuai dengan aturan yang ada yakni mengacu pada dari BKPSDN agar para peserta Diklat membuat inovasi guna memudahkan kegiatan di wilayah kerja masing-masing. Dalam pelaksanaannya terdapat penghamabta pada Kelancaran dari proses fungsi adalah kurangnya pemahaman para kader pada saat mengisi data pada aplikasi, kemudian adaptasi teknologi terbaru seperti informasi kadang kurang tersampaikan dengan jelas. Selain itu koordinasi antar bidang terkait juga rendah sehingga perlu ditingkatkan.

Dari beberapa hal di atas menunjukkan kesesuaian dengan teori implemementasi kebijakan menurut Randall B. Ripley and Grace A. Franklin (1986:232-33) (dalam Alfatih, 2010:51-52). Bahwa untuk mengukur keberhasilan implemementasi kebijakan dapat dilihat dari 3 (tiga) perspektif yaitu :

- 1) Tingkat kepatuhan para implementor dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan seperti peraturan perundang-undangan.
- 2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi yang ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
- 3) Bahwa keberhasilan suatu implementasi mengacu dan mengarah pada kinerja dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki dari semua program-program yang direncanakan

2. Hambatan Implementasi

Hambatan dalam Penerapan Sistem Informasi Terpadu adalah kurangnya pemahaman para kader dalam menggunakan aplikasi ketika mengisi data. Kemudian koordinasi dengan bidang terkait juga rendah sehingga menghambat dalam membuat keputusan. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan kerja seperti pendataan juga belum memadai.

3. Solusi Mengatasi Hambatan

Solusi dalam mengatasi kendala ini tentunya berkoordinasi dengan berbagai bidang yang berkaitan selanjutnya menambah atau merekrut pegawai baru yang akan membantu proses pendataan. Melakukan sosialisasi atau pelatihan kepada para agar lebih memahami dalam penggunaan aplikasi atau sistem. Kemudian peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implemementasi dari kegiatan Sitem Informasi Terpadu sudah berjalan sebagai mana mestinya, para

kader sudah melakukan kegiatan ini sesuai dengan aturan dan SOP yang ada. Namun dalam pelaksanaannya belum maksimal karena beberapa kendala baik dari para kader yang belum memahami secara utuh terkait aplikasi yang digunakan begitu juga dengan sarana prasarana yang perlu ditingkatkan.

2. Kendala kendala yang ditemukan adalah adalah kekurangan dari kurangnya sumber daya manusia dalam mengoperasikan aplikasi tersebut, koordinasi antar bidang yang tidak terjalin dengan baik, terkait sarana prasarana seperti jaringan internet dan handphone yang belum tersedia.
3. Solusi dari kendala kendala ini adalah dari kendala ini adalah dengan melakukan pelatihan kepada para kader dan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan koordinasi terhadap bidang dan pemangku jabatan terkait kegiatan, meningkatkan sarana dan prasarana.

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti uraikan di atas, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah:

1. Melakukan peningkatan sarana dan prasaranan penunjang kerja, seperti fasilitas internet dan handphone.
2. Melakukan bimbingan teknis, workshop, dan seminar untuk menambah pengetahuan tentang penggunaan aplikasi.
3. Melakukan pengawasan dan memberikan pelatihan agar kader tersebut semakinkompeten dalam tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2014. Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Beni Ahmad Saebani. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Brotosaputro, B. 2012. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2013. Marketing Managemen And Service, Quality Satisfaction, 15th Edition, Pearson Education, Inc.
- Kotler, Philip and Kevin Lane Keller, 2016. Marketing Managemen And Service, Quality Satisfaction, 15th Edition, Pearson Education, Inc.
- Lupiyoadi Rambat, 2013. Manajemen Pemasaran jasa Edisi kedua. Penerbit Salemba Empat: Jakarta.
- Mardiasmo. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Andi Offset.
- Mukarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy, 2015. Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, 2013, Manajemen Sumber daya Manusia, Jakarta : Bumi aksara. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syarif, Mohamad. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Jurnal:

- A.H. Rahadian (2018). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.
- Agus Rusman (2017) dengan Judul : "Efektivitas Pelaksanaan Posyandu Sebagai Pusat Informasi Kesehatan Ibu dan Anak". Iram Barida Maisya (2010) dengan Judul : "Peran Kader Dan Klian Adat Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian Posyandu (Studi Kasus Di Kabupaten Badung,

Gianyar, Klungkung, dan Tabanan).

Albertina Novi, Mary Ismowati (2018). Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Iklim Organisasi Terhadap Kualitas Pelayanan Di Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Barat *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.

Bambang Irawan (2016) *Organizational Capacity Development to Respond to Social Services for Homeless Children*. 144.

Mari Ismowaty (2016). *Kajian Urgency Publik Private Patnership Di Kota Bandung*. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.

Mary Ismowati, R. Mardiyanto (2018) “Analisis Indeks kepuasan Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan kepuasan Pelayanan Masyarakat Di Kantor Kecamatan Kota Baru kabupaten Karawang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*”.

Mary Ismowati, S Sulatifah (2019) “Analisis Faktor Kualitas Pelayanan di Kelurahan Jatikarya Kecamatan Jatisampurna Kota Bekasi *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*”.

Risda Monica (2017) The titel :“Positive deviance Approach for Attendance Improvement of Integrated Health Post Target”.

Wahyudin Latunreng (2017) *Management Control Systems with in Sustainable Ecotourism: A Study of Belitung*.

Undang-Undang:

KEMENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003, tentang pelayanan ialah semua bentuk aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di pusat, di daerah maupun di lingkungan badan usaha milik negara atau daerah dalam wujud barang maupun jasa dalam rancangan pemenuhan kepentingan masyarakat dan dalam rancangan pelaksanaan ketetapan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2020 tentang Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu Di Daerah Provinsi Jawa Barat. Departemen Kesehatan RI.2006 tentang Posyandu.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 89 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2020-2021.

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, Bab I Pasal I ayat (1) tentang pengertian pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009 tentang ketentuan-ketentuan p A. Shabri, “Sistem Monitoring Kesehatan